

**PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) PROVINSI RIAU PERIODE 2009 – 2014 TERHADAP  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**OLEH :**

**ELFIN ZAINADI**

**NIM : 10543005227**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2010**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU PERIODE 2009 – 2014 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Oleh:**

**ELFIN ZAINADI**

*Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan Otonomi daerah.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode 2009 – 2014 yang berjumlah 55 orang. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Baik, masyarakat telah benar-benar dilibatkan didalam proses penyusunan arah kebijakan umum APBD, penyusunan rancangan APBD maupun didalam proses revisi APBD melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah.*

*Maka dari itu Tingkat partisipasi masyarakat yang telah ada senantiasa dipertahankan dan senantiasa diupayakan untuk terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan peraturan-peraturan daerah serta pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung bagi masyarakat Provinsi Riau.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Penegasan Istilah .....	4
D. Permasalahan dan Batasan Permasalahan .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional .....	7
G. Metode Penelitian .....	23
H. Teknik Analisis Data .....	25
I. Sistematika Penulisan .....	25
 <b>BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Provinsi Riau.....	27
B. Visi dan Misi DPRD Provinsi Riau .....	38
C. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi Riau .....	39
D. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Riau.....	40
E. Nama Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009 – 2014 ...	41
F. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Riau.....	44
 <b>BAB III : PENYAJIAN DATA</b>	
A. Analisis Hasil Rekapitulasi Deskripsi Responden.....	47

B.	Analisis Hasil Rekapitulasi Jawaban Partisipasi Masyarakat.	49
----	---	----

<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISA DATA</b>	57
---------------	-----------------------	----

<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
--------------	------------------	--

A.	Kesimpulan	58
----	------------	----

B.	Saran	58
----	-------	----

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan Otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan jargon politik belaka, akan tetapi daerah saat ini ditantang kesiapannya baik secara kelembagaan,

sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan dilingkungan mereka (*institutional reform*).

Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah, implikasi kedua undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta sistem manajemen keuangan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (*public money*) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder Pemerintahan Daerah.

*World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resource for development of society*” sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*”. Dalam hal ini *World Bank*

lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *UNDP* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada *World Bank* dan *UNDP*, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance* (Eddi Wibowo, Tomo HS, dan Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2004: 45)

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **”Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2009 – 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ”**

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul dalam penelitian ini, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Masalah ini sangat menarik untuk diteliti, karena pada era sekarang ini masyarakat dan pemerintah daerah dituntut untuk ikut serta dalam perumusan dan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- 2) Penulis merasa mampu untuk meneliti baik dari segi waktu, tempat, tenaga dan dana.
- 3) Masalah ini erat kaitannya dengan Jurusan dimana Penulis berstudi

## C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap kata-kata dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah berikut:

- 1) Persepsi pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*). Namun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2009-2014 tentang partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Rakhmat; 2005:51).
- 2) Partisipasi Masyarakat adalah sebagai salah satu prinsip *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para *stakeholder* sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif



pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (*World Bank*, 1996 : 34)

- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah provinsi yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. DPRD Provinsi juga berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (<http://www.wikipedia.com>)
- 4) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Mardiasmo, 2003:45)

#### **D. Rumusan Masalah dan Batasan Permasalahan**

##### **1) Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD?

##### **2) Batas Permasalahan**

Untuk memfokuskan permasalahan penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti; Bagaimana persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD. Diteliti yaitu

partisipasi masyarakat dari sudut pandang anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2009 – 2014.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjana. Serta untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan mendalami minat dalam bidang ilmu komunikasi yang telah didapatkan selama kuliah
- b. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur komunikasi sektor publik terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik.
- c. Sementara bagi pemerintah daerah provinsi riau diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

## **F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pembahasan kerangka teoritis ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini:

#### **1.1 Persepsi**

##### **1.1.1 Definisi Persepsi**

Secara etimologis, persepsi atau *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil (Sobur; 2003 : 446). Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberi makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*) (Rakhmat; 2005 : 51).

Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi individu tidak akurat, individu tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsi yang menentukan individu memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering individu-individu tersebut berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, dalam Sobur; 2003 : 446)

##### **1.1.2 Faktor Pembentuk Persepsi**

Persepsi individu terhadap suatu objek tidak terjadi begitu saja, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor fungsional yang berasal dari

kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Jadi, persepsi tidak hanya ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi juga karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut dan bermula dari kondisi biologisnya (Rakhmat; 2001 : 55). Pasla dan Dinata (2004:34) juga menyebutkan bahwa persepsi individu akan suatu objek terbentuk dengan adanya peran dari *perceiver*, target, dan situation. Perceiver mendapat rangsangan dan melakukan proses persepsi berdasarkan *need*, *expectation*, *experience* yang dimiliki perceiver. Rangsangan yang diterima perceiver adalah target yang dapat berbentuk produk maupun jasa. Dalam mempersepsikan target, situation yang merupakan suasana di sekitar target dan perceiver. Proses membentuk persepsi akan suatu objek tersebut bisa saja mendapat gangguan dari luar/*distortion* berupa *stereotype*, *halo effect*, *first impression*, atau *jumping to conclusion*, yang dapat menyebabkan terjadi penyimpangan pada persepsi individu.

Menurut Kasali (1994:23), faktor-faktor pembentuk persepsi diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Latar belakang budaya

Persepsi terikat oleh budaya (*culture-bound*). Tidak ada dua orang mempunyai nilai nilai budaya yang persis sama, maka tidak ada dua orang pula yang mempunyai persepsi yang persepsinya persis sama. Salah satu unsur budaya adalah kepercayaan. Di mana kepercayaan adalah anggapan subjektif bahwa suatu objek atau peristiwa punya ciri atau nilai tertentu, dengan atau tanpa bukti. Nilai biasanya bersumber dari filosofis yang lebih

besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah. Persepsi tentang diri dan orang lain (*perception of self and others*) pada masyarakat Timur, pada umumnya adalah masyarakat kolektivis.

Dalam budaya kolektivitas, diri (*self*) tidak bersifat unik atau otonom, melainkan melebur dalam kelompok (keluarga, klan, kelompok kerja, suku, bangsa dan sebagainya). Sementara dalam budaya individualis (Barat) bersifat otonom. Akan tetapi dalam suatu budaya sebenarnya dapat saja memiliki kecenderungan individualistis dan kolektivis, hanya saja, salah satu biasanya lebih menonjol. Pemahaman terhadap suatu hal tidak lepas dari pengaruh latar belakang pendidikan dan berkembangnya pola pikir kearah yang lebih maju atau moderen.

## 2) Pengalaman masa lalu

Pengalaman seseorang tentang objek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang telah diterima sebelumnya.

## 3) Nilai-nilai yang dianut

Nilai yang dianut terbentuk karena adanya pengharapan (*expectations*), antara lain: hal yang tidak asing, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan serta motif (*motives*) orang cenderung menerima sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan, kekuatan kebutuhan dan besarnya kecenderungan untuk mengabaikan stimuli yang tidak berhubungan di lingkungannya.

#### 4) Berita-berita yang berkembang

Berita-berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mendukung dan/atau mempengaruhi terbentuknya persepsi pada benak khalayak. Persepsi yang baik atau buruk dapat terbentuk pada benak khalayak dari banyak atau seringnya melihat suatu berita yang ada, karena proses berpikir dapat dibentuk melalui informasi yang diperoleh khalayak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa proses pengolahan pesan yang diterima tidak dapat terbentuk begitu saja oleh penerima pesan, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari individu tersebut.

#### **1.1.3 Proses Persepsi**

Persepsi merupakan sebuah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan (Davidoff, dalam Walgito, 1994 : 57). Dengan demikian dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut (Sobur, 2003 : 447):

- 1) Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- 2) Mengorganisasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Dalam fase ini, rangsangan yang diterima

selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk. Ada tiga dimensi utama dalam pengorganisasian rangsangan, yakni:

- a. Pengelompokan, meliputi kesamaan, kedekatan, dan kecenderungan untuk melengkapi.
  - b. Bentuk timbul dan latar, yaitu kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada gejala-gejala tertentu yang timbul menonjol, sedangkan rangsangan atau gejala lainnya berada di latar belakang.
  - c. Kemantapan persepsi, yaitu kecenderungan untuk menstabilkan persepsi, dan perubahan-perubahan konteks tidak memengaruhinya.
- 3) Interpretasi yaitu memberikan arti pada berbagai data dan informasi yang diterima. Interpretasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. Selanjutnya, hasil interpretasi ini membentuk persepsi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Jadi, proses persepsi adalah melakukan seleksi, organisasi, dan interpretasi sehingga terjadi pembulatan terhadap informasi yang sampai.

## **1.2 Pengertian Partisipasi**

Partisipasi sebagai salah satu prinsip *good governance*, dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para *stakeholder* sebagai partisipan saling

mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka (*World Bank*, 1996 : 45).

Partisipan bukan merupakan aktor tunggal, Pemerintah Pusat, Menteri, DPR Pemerintah Daerah, DPRD, LSM, Organisasi-organisasi publik, pihak-pihak swasta serta warga negara merupakan bagian dari partisipan (Brinkerhoff, 2002) Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk antara lain melalui wakil-wakil rakyat yang ada dewan (DPRD). Melalui wakil-wakil rakyat aspirasi masyarakat disampaikan kepada pemerintah daerah. Selain hal tersebut didalam masa reses anggota dewan melakukan proses *hearing* dengan masyarakat secara langsung yang disebut dengan Penjaringan Aspirasi Masyarakat hasilnya kemudian dirumuskan dan disebut dengan Pokok- Pokok Pikiran Dewan yang digunakan sebagai salah satu acuan didalam proses penyusunan APBD.

Pemerintah daerah pun memiliki Kotak Pos Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh bagian Humas Pemprov yang menerima pengaduan, keluhan ataupun usulan dalam bentuk surat tertulis secara langsung dari masyarakat. Masyarakat pun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Kepala Daerah didalam kegiatan kunjungan rutin yang berlangsung tiap satu minggu sekali. Kepala Daerah juga membuka pengaduan, keluhan ataupun usulan melalui Layanan Pesan Singkat/SMS (*Short Message Service*). Kemudian masyarakat pun dapat melakukan unjuk rasa/demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi (Eddi Wibowo dkk, 2004 : 56).



### 1.3 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD. Arah Kebijakan umum APBD disusun setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Glenn A. Welsch (1995 : 78) menyebutkan bahwa anggaran adalah suatu bentuk *statement* daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/*blue print* dalam periode tersebut.

Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury (1996 : 32), bahwa anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu (1 tahun). Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa–masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran–ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Serta menurut Marsono (1998 : 28) memberikan definisi bahwa Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Dari berbagai definisi tersebut diatas dapat disimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut :

- 1) Merupakan informasi atau pernyataan.
- 2) Rencana atau rancangan kebijaksanaan bidang keuangan.
- 3) Dari suatu pemerintah, organisasi atau badan usaha.
- 4) Untuk suatu periode waktu tertentu (umumnya 1 tahun)
- 5) Merupakan perkiraan penerimaan dan pengeluaran daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

#### **1.4 Fungsi dan Manfaat Anggaran**

Anggaran memiliki beberapa fungsi utama (Mardiasmo, 2003 : 49) yaitu :

1. Sebagai Alat Perencanaan.

Anggaran merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Anggaran digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.

2. Alat Pengendalian.

Anggaran digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif, mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program karena anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran pemerintah sehingga pembelanjaan yang dilakukan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Alat Kebijakan Fiskal.

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Anggaran juga digunakan untuk mendorong memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Politik.

Anggaran merupakan dokumen publik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Penyusunan anggaran memerlukan koordinasi dan komunikasi dari seluruh unit kerja sehingga apabila terjadi inkonsistensi suatu unit kerja dapat dideteksi secara cepat.

#### 6. Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

#### 7. Alat Motivasi.

Anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai (*challenging but attainable*) atau menuntut tetapi dapat diwujudkan (*demanding but achievable*) sebagai motivasi bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi

Anggaran menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik.

Perencanaan dan pengendalian manajerial merupakan suatu proses siklus yang berlanjut dan saling berkesinambungan, sehingga salah satu tahap akan

terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pendlebury (1996 : 56) membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap, yaitu :

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar.

Merupakan proses perumusan tujuan dasar dari organisasi yang menggambarkan dengan visi dan misi organisasi. Perencanaan ini dilakukan diluar dari perencanaan operasional. Perencanaan ini dirumuskan dan disusun oleh manajemen tingkat atas dan merupakan proses perencanaan yang rumit dan pelik karena menyangkut keberlangsungan organisasi dan terkait dengan harapan dan tujuan dasar organisasi

2. Perencanaan operasional.

Merupakan perencanaan yang dirumuskan dan disusun untuk tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi.

3. Penganggaran.

Adalah proses penyusunan anggaran untuk mendukung perencanaan operasional yang telah disusun serta untuk melaksanakan tujuan-tujuan dan target-target organisasi dalam jangka pendek (kegiatan operasional).

4. Pengendalian dan pengukuran.

Proses pengendalian, pengawasan dan pengukuran atas anggaran yang telah disepakati untuk dilaksanakan. Merupakan proses pelaksanaan tujuan-tujuan dan target-target jangka pendek organisasi (kegiatan operasional).

5. Pelaporan, analisis dan umpan balik

Merupakan proses akhir dari siklus perencanaan dan pengendalian manajerial. Terdiri atas proses pelaporan hasil kegiatan operasional yang telah dicapai selama periode berlangsung, analisa atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan maupun kegiatan yang gagal dilaksanakan. Serta umpan balik untuk pelaksanaan kegiatan periode berlangsung ataupun periode berikutnya

### **1.5 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

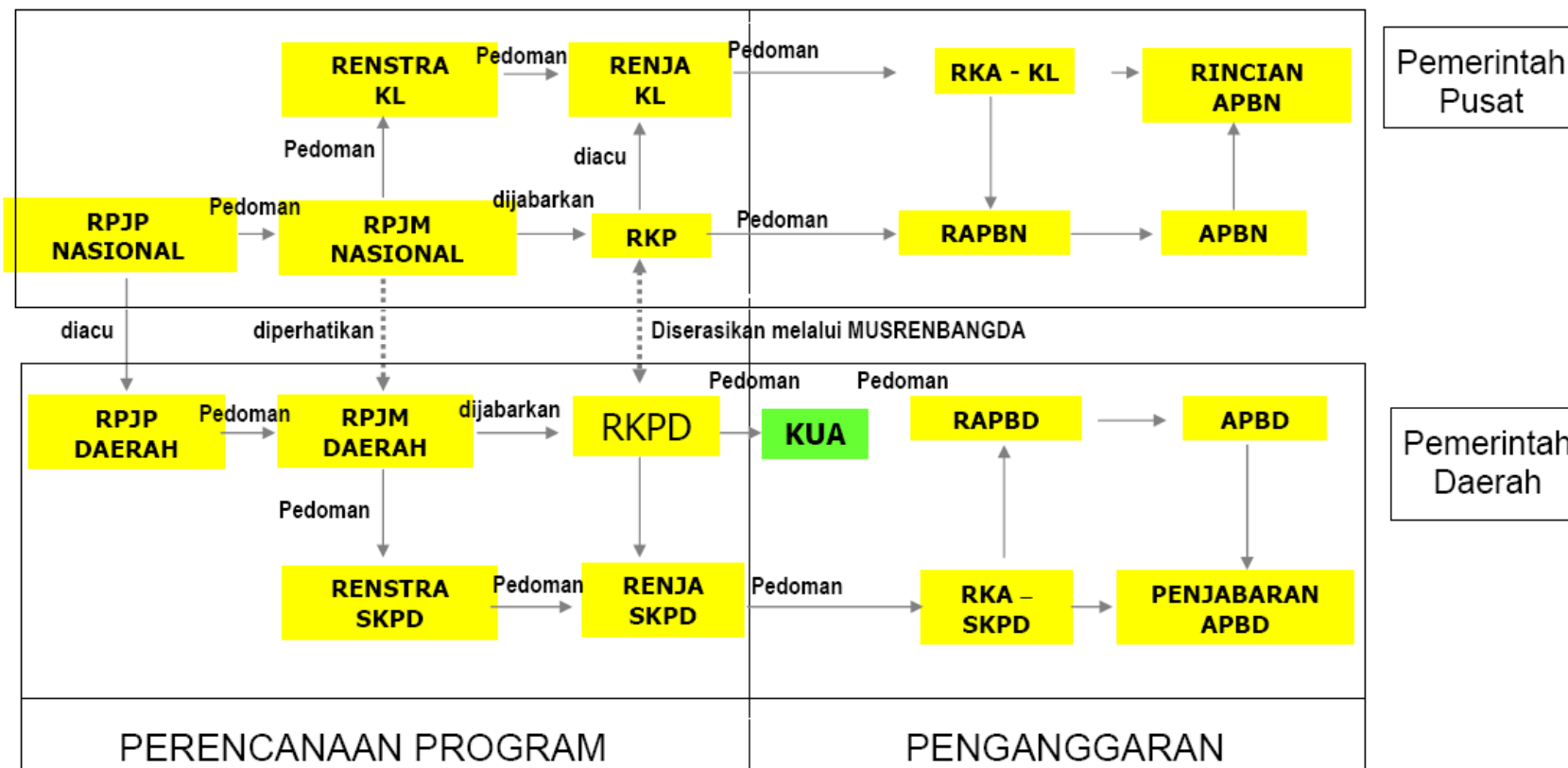
Anggaran tahunan dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dan upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yang berupa rencana kerja pemerintah daerah kemudian DPRD bersama dengan Gubernur men-sepakati Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD tahun anggaran dan menetapkan strategi dan prioritas APBD tahun anggaran. Berdasarkan instruksi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Satuan Kerja pengguna anggaran menyusun usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan disampaikan kepada Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL).

DPRD melakukan serangkaian pertemuan dengan masyarakat (*publiic hearing*) dan kepala satuan kerja agar pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran benar-benar merefleksikan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten melalui Panitia Anggaran Eksekutif mengkaji dan menilai rencana anggaran yang diusulkan masing-masing

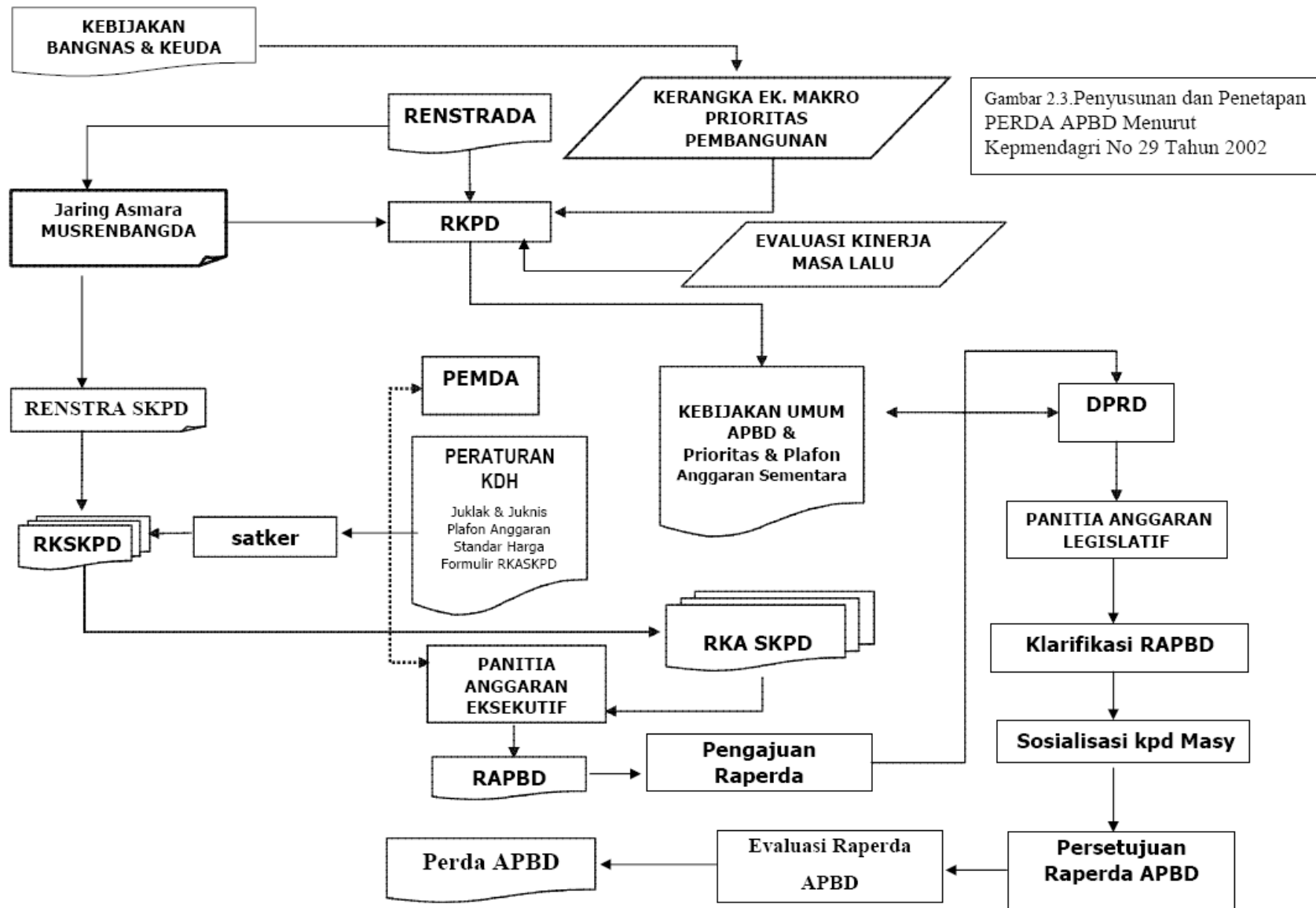
satuan kerja, apakah usulan mereka telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah digariskan.

Kemudian Panitia Anggaran Eksekutif menyusun rancangan APBD tahunan untuk dipertimbangkan oleh Gubernur. Selanjutnya Gubernur akan menyerahkan Rancangan APBD tersebut kepada DPRD. Rancangan APBD tersebut kemudian dibahas bersama antara Panitia Anggaran Eksekutif (PAE) dan Panitia Anggaran Legislatif (PAL) sambil tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Kemudian setelah selesai dibahas dan disetujui untuk menjadi Rancangan APBD Provinsi Riau. RAPBD tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri maka Gubernur kemudian menetapkan RAPBD tersebut menjadi Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD.

**Gambar 1.2. Alur Perencanaan Program menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran menurut UU Keuangan Negara**







## 2. Konsep Operasional

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris. Untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, variabel-variabel yang diteliti perlu diukur. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua variable.

- 1) Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktifitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat ini yaitu
  - a. Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
  - b. Masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD.
  - c. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD.
  - d. Pelibatan masyarakat dalam advokasi APBD,
  - e. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD
  - f. Kritik dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD
  - g. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dan waktu penelitian dari Agustus 2009 sampai dengan selesai.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2009-2014 sedangkan objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

#### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:34). Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode 2009 – 2014 yang berjumlah 55 orang.

#### **b. Sampel**

Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel total (sensus). Di mana, sampel total merupakan proses penelitian yang mengambil suatu elemen dari populasi untuk diteliti (Ruslan, 2006 : 41). Penelitian ini menggunakan teknik sampel total karena jumlah populasi penelitian ini yang tidak terlalu besar

#### **c. Sumber Data**

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar

Husein, 2002 : 34). Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi responden (sampel) penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diadopsi oleh penulis dari penelitian sejenis yang telah disampaikan didalam bab sebelumnya.

- 2) Data-data lain yang bersifat sekunder dan terkait dengan penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya yang berasal dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Periode 2009 - 2014 serta dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian

### 3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden (Sugiyono, 2004: 39)
- 2) Wawancara, yakni mengambil pendapat dan informasi dari responden dengan mengadakan komunikasi langsung.
- 3) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian observasi ini dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 4) Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

## **H. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif, Menurut Sugiono (2004 : 42) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pihak yang diamati yang tentu saja berasal dari kuesioner yang disebarkan. Analisis data yang dilakukan adalah mengumpulkan kuesioner untuk mengambil penilaian dan generalisasi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka penyusunan skripsi, penulis akan menyajikan sistematika penulisan mulai dari latar belakang hingga kesimpulan yang akan diajukan oleh penulis.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi : Latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian teknik analisis data dan sistematika penulisan

## **BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi : Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, visi dan misi dan fungsi dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

## **BAB III : PENYAJIAN DATA**

Bab ini berisi : hasil pernyataan-pernyataan persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau terhadap Partisipasi Masyarakat.

## **BAB IV : ANALISA DATA**

Bab ini berisi : pembahasan dan analisa persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau terhadap Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi : Kesimpulan dan Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Berdirinya Provinsi Riau**

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II :

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang



baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau

tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari

1. Wan Ghalib
2. Soeman Hs
3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Masjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipi Gandamana.

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan "NASAKOM". Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.

Sejalan dengan itu dibentuk pula apa yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsur Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi parta-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideologi yang bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal. Atas dasar Nasakomisasi ini, maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa, maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari

beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.

Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

1. Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay
2. Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas
3. Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer
4. Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf
5. Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim
6. Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.

Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi

waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.

Tetapi nyatanya pemerintah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepulauan Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepulauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.

Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang terbatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijakan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsaraan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.

Pada tahun-tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.

Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam



masyarakat Pancasila menimbulkan keretakan sosial dan mengguncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami Cs mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Cina yang berkewargaan negara RRC memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau mengadakan konsolidasi dan *Show of force* dalam memperingati Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, jadi sehari mendahului waktu peringatan yang sebenarnya. Tindakan selanjutnya; PKI beserta ormas-ormasnya memboikot sidang pleno lengkap Front Nasional Riau yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kaharuddin Nasution pada tanggal 30 September 1965. Ternyata kegiatan dan pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya adalah untuk merebut pemerintahan yang syah. Kondisi ini akhirnya bisa di akhiri, perjuangan generasi muda Riau tidak sia-sia, rezim Orde Lama di Riau tamat sejarahnya dan Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 Nopember 1966. Mulai saat itu tertancplah tonggak kemenangan Orde Baru di Riau.

Dengan diangkatnya Kolonel Arifin Achmat sebagai care taker Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/4/43-1506. pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada tanggal 15 Nopember 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Riau dengan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/67. Maka Menteri Dalam Negeri mengsyahkan pengangkatan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Kepala Derah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan Surat Keputusan No. UP/6/1/36-260, tertanggal 24 Februari 1967. Surat Keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor : 146/M/1969 tertanggal 17 Nopember 1969.

Hingga sekarang pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980
5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
6. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. Soeripto Periode 1988 – 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 – 2008
12. H.M. Rusli Zainal Periode 2008 – sekarang

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 33 Provinsi.

Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota (10) Pekanbaru, (11) Dumai dan yang terakhir baru bergabung Kabupaten Meranti (12) (<http://www.riau.go.id>)

## **B. Visi dan Misi DPRD Provinsi Riau**

Visi DPRD Propinsi Riau adalah terwujudnya Anggota DPRD yang professional untuk menjadikan Provinsi Riau yang maju dan terkemuka."

Misi DPRD Propinsi Riau adalah:

1. Mewujudkan DPRD yang peka tanggap, kritis dan responsive serta berwawasan luas.
2. Mewujudkan produktivitas SDM Sekretariat DPRD yang berorientasi pada profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi.

3. Mewujudkan pengawasan DPRD dari hulu hingga hilir, hidup aktif, terpercaya, objektif dan bertanggung jawab.
4. Mewujudkan DPRD yang handal dan cefabel.
5. Mewujudkan DPRD yang dinamis, proaktif dan komunikatif.
6. Mewujudkan sinergi DPRD yang kokoh berdaya nalar tinggi, jujur dan *accountable*.
7. Mewujudkan harmonisasi dalam lingkup DPRD untuk mendorong sinergitas DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta dengan jajaran pemerintah provinsi beserta instansi lainnya. (Sekretaris Dewan Provinsi Riau, 2006)

### **C. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi Riau**

#### **1. Kewajiban DPRD Propinsi Riau**

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, DPRD berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;

- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## 2. Hak DPRD Propinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD mempunyai hak yaitu:

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat (Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau, 2006)

## **D. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Riau**

Kedudukan DPRD Propinsi Riau yaitu:

- a. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah.
- b. DPRD terdiri atas Anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum Anggota DPRD Tahun 2009.

Fungsi DPRD Propinsi Riau

- 1) Fungsi Legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Fungsi Anggaran, yaitu menetapkan APBD bersama-sama dengan Gubernur; dan

- 3) Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

#### Tugas dan Wewenang DPRD Propinsi Riau

- 1) Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Gubernur
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan;
- 5) Memilih wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Gubernur;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau, 2006)

#### **E. Nama Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009 – 2014**

Nama Pimpinan dan Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Masa Jabatan 2009-2014:

1. Abdul Wahid, S.Pdi (PKB)
2. Drs. H. Adrian Ali (PAN)
3. Almanis, S.Pd (PDIP)
4. Arifin Bantu Purba, SH MH (PDIP)
5. Drs. H. Asruf Jaafar (Partai Demokrat)
6. Ayat Cahyadi, S, Si (PKS)
7. H. Aziz Zainal, SH MH (PPP)
8. Bagus Santoso, S.Ag (PAN)
9. H. Darisman Achmad Lc MA (PKS)
10. Elly Suryani SH (Partai Golkar)
11. M. Faisal Aswan, SE (Partai Golkar)
12. H. Hazmi Setiawan, MT (PAN)
13. H. James Pasaribu (PDIP)
14. H. Ilyas Labai, S.Sos (Partai Golkar)
15. Indra Isnaini, ST (PKS)
16. Dra. Hj. Iwa Sirwani Bibra (Partai Golkar)
17. Jabarullah, S.Sos (PPP)

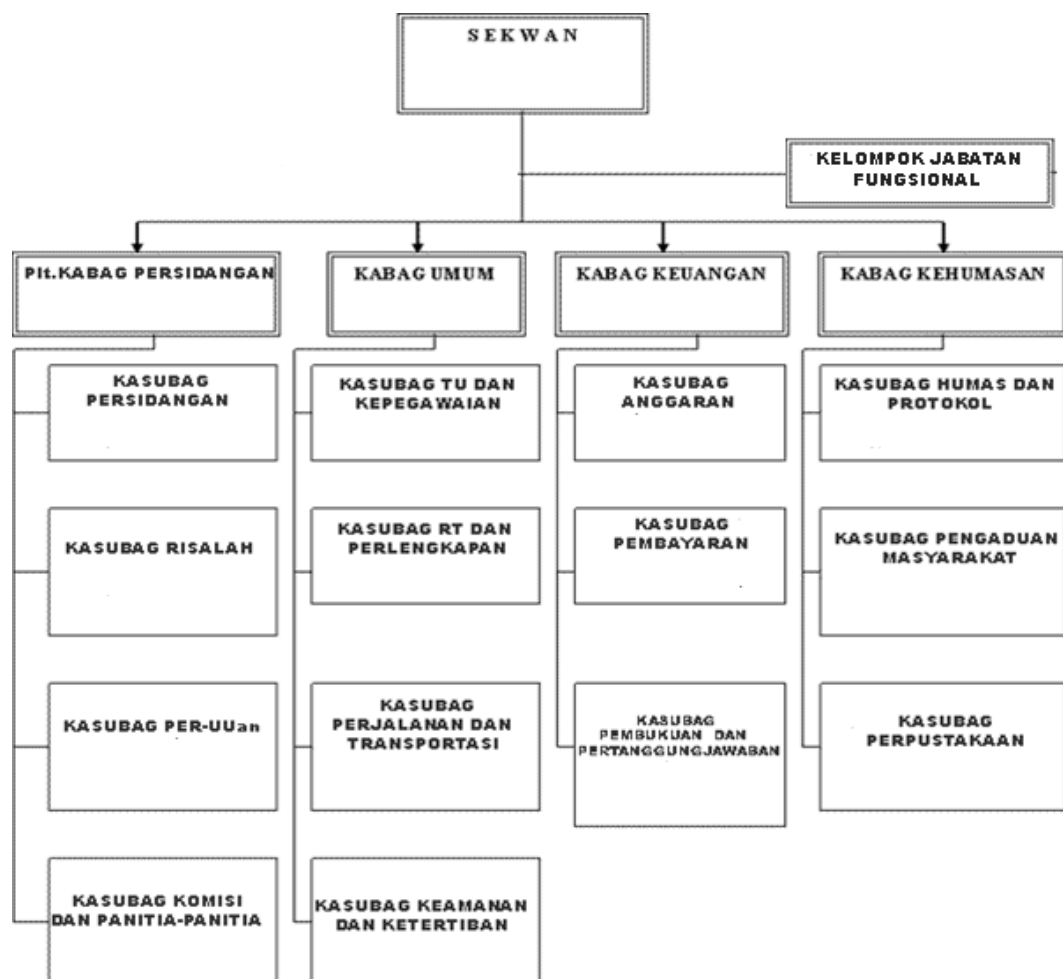
18. Jefry Noer (Partai Demokrat)
19. Drs. H. Johar Firdaus, MS (Partai Golkar)
20. Ir. H. A Kirjuhari (PAN)
21. Lampita Pakpahan (PPRN)
22. Mahdinur (PKS)
23. H. Masnur, SH (Partai Golkar)
24. Drs. H. M. Roem Zein (PPP)
25. Muhammad Dunir, S.Ag (PKB)
26. Hj. Mukhniarti (Partai Demokrat)
27. Ir. Noviwaldy Jusman (Partai Demokrat)
28. Ir. Nurzaman (Partai Gerindra)
29. Ramli FE, SE, ME (PBR)
30. H. Ramli Sanur (PAN)
31. Riky Hariansyah, ST (PKB)
32. Rita Zahara (Partai Demokrat)
33. Robin P. Hutagalung (PDIP)
34. Dra. Hj. Rosvanilda Zulher (Partai Golkar)
35. Ruslan Jaya, SH MH (Partai Golkar)
36. H. Rusli Effendi (PPP)
37. Solihin Dahlan (PBR)
38. Sumiyati, S.Sos MSi (Partai Golkar)
39. Suparman, S.Sos M.Si (Partai Golkar)
40. Hj. Supriati (Partai Golkar)
41. H. Syafrudin Sa'an Lc (PKS)
42. H. Syamsuri Latif (Partai Golkar)
43. H. Syarif Hidayat, SH (PPP)
44. Dra. Hj. Nazlah Khairati (PPP)
45. T. Rusli Ahmad (PDIP)
46. Tabrani Maamun (Partai Golkar)
47. H. Taufan Andoso Yakin (PAN)
48. H. Tengku Azuwir (Partai Demokrat)



49. Tengku Muhazza (Partai Demokrat)
50. Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM (Partai Demokrat)
51. Turoechan Asy'ari (PDIP)
52. Yopie Andrianto, SE (Partai Golkar)
53. Zukri (DPIP)
54. Zulfan Heri (Partai Golkar)
55. H. Zulkarnain Nurdin, SH MH (PBB)

## F. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Riau

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi DPRD Provinsi Riau**



Sumber: Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan daerah
- d. Memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

Dalam bab ini disajikan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian melalui penyebaran angket, observasi dan wawancara. Penyebaran angket yang penulis lakukan adalah dengan cara menyebarkan kepada responden yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2009 – 2014. kemudian observasi penulis lakukan dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2009 – 2014. sedangkan wawancara penulis lakukan terhadap beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau periode 2009 – 2014 yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari penyebaran angket dan observasi dimaksudkan untuk mencari data tentang Bagaimana persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD, adapun untuk menentukan kriteria pendapat anggota dewan yaitu dengan membuat interval antara 1 sampai dengan 5 dan menggunakan rata-rata skor total jawaban, persepsi responden, secara umum dapat ditentukan dengan melihat letak rata-rata skor jawaban dalam interval kelas yang ditentukan

$$Interval = \frac{5-1}{5} = 0.8$$

Dari informasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagai berikut:

- 1) Nilai jawaban 1,00 – 1,79 = penilaian sangat rendah/sangat tidak setuju.
- 2) Nilai jawaban 1,80 – 2,59 = penilaian rendah./tidak setuju.

- 3) Nilai jawaban 2,60 – 3,39 = penilaian ragu-ragu
  - 4) Nilai jawaban 3,40 – 4,19 = penilaian tinggi/setuju.
  - 5) Nilai jawaban 4,20 – 5,00 = penilaian sangat tinggi/sangat setuju
- (Arikunto, 2002 : 67)

#### **A. Analisis Hasil Rekapitulasi Deskripsi Responden**

Untuk keperluan analisis dilakukan pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009 – 2014.. Kuesioner diberikan kepada responden sebanyak 55 orang. Karakteristik responden dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Riau yang diperoleh antara lain data tentang jenis kelamin, usia, pendidikan dan pembagian komisi.

##### **1. Jenis Kelamin**

**Tabel 3.1**  
**JENIS KELAMIN RESPONDEN**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Banyak Responden</b>	<b>Persentase</b>
1.	Pria	48	87,27
2.	Wanita	7	12,73
	Jumlah	55	100

**Sumber : Data primer yang diolah, 2009**

Tabel 3.1 menunjukkan mayoritas anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 -2014 berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 48 orang atau 87,27% dan responden yang berjenis kelamin wanita hanya sebanyak 7 responden atau 12,73%.

## 2. Usia

**Tabel 3.2**  
**USIA RESPONDEN**

No.	USIA	Banyak Responden	Persentase
1	21 - 35 tahun	10	18,18
2	36 - 45 tahun	28	50,91
3	> 46 tahun	17	30,91
	Jumlah	55	100.00

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan mayoritas anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014 berusia 36 – 45 tahun yaitu sebanyak 28 orang atau 50,91%, yang berusia > 46 tahun sebanyak 17 orang atau 30,91 % dan anggota dewan yang berusia 21 – 35 tahun hanya sebanyak 10 responden atau 18,18%.

## 3. Pendidikan Terakhir

**Tabel 3.3**  
**PENDIDIKAN RESPONDEN**

No.	PENDIDIKAN	Banyak Responden	Persentase
1	SLTA	11	20,00
2	D3	3	5,45
3	S1	23	41,82
4	S2	18	32,73
5	S3	0	0,00
	Jumlah	55	100.00

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Dari Tabel 3.3 menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 – 2014 memiliki tingkat pendidikan S1 (Strata 1) yaitu sebanyak 23 orang atau 41,82 %, 18 orang atau 32,73% berpendidikan S2 (Strata 2), dan yang

berpendidikan SLTA sebanyak 11 orang atau 20,00 %, yang berpendidikan D3 (Diploma) hanya 3 orang atau 5,45 %, dan yang S3 (Strata 3) tidak ada.

#### 4. Komisi

**Tabel 3.4**  
**PEMBAGIAN KOMISI RESPONDEN**

No.	KOMISI	Banyak Responden	Persentase
1	A (Pemerintahan)	11	20.00
2	B (Perekonomian)	14	25.45
3	C (Keuangan)	13	23.64
4	D (Pembangunan)	13	23.64
	Jumlah	51	92.73

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Dari Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pembagian Komisi pada anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 – 2014 yakni 13 orang atau 23,64% yang membidangi tentang pemerintahan (Komisi A), 14 orang atau sebesar 25,45% membidangi tentang perekonomian (Komisi B), 14 orang atau sebesar 25,45% membidangi tentang Keuangan (Komisi C) dan 14 orang atau sebesar 25,45% membidangi tentang (Komisi D). Sedangkan sisanya yang 4 orang yaitu Ketua dan Wakil Ketua.

#### **B. Analisis Hasil Rekapitulasi Jawaban Partisipasi Masyarakat**

- 1) Menurut persepsi Anggota Dewan masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.

**Tabel 3.5**  
**MENURUT ANDA, MASYARAKAT DILIBATKAN DALAM**  
**MEMBERIKAN MASUKAN SAAT PENYUSUNAN ARAH DAN**  
**KEBIJAKAN UMUM APBD**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	34	61,82
2	Setuju (S)	16	29,09
3	Ragu-ragu (RR)	4	7,27
4	Tidak Setuju (TS)	1	1,82
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00
	Jumlah	55	100

Skor Total	Rata-rata	Kriteria
248	4,51	Sangat setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Dari tabel diatas bahwa responden sebanyak 34 orang anggota dewan atau sebesar 61,82 % menyatakan sangat setuju dan sebanyak 16 orang anggota dewan atau sebesar 29,09 % menyatakan setuju, hal ini berarti persepsi Anggota DPRD Provinsi riau sudah benar-benar melibatkan masyarakat didalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

- 2) menurut anggota Dewan Kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi dan prioritas APBD

**Tabel 3.6**  
**MENURUT ANDA, KRITIK DAN SARAN MASYARAKAT DAPAT**  
**MENENTUKAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	10	18,18
2	Setuju (S)	38	69,09
3	Ragu-ragu (RR)	5	9,09
4	Tidak Setuju (TS)	2	3,64
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00
	Jumlah	55	100

Skor Total	Rata-rata	Kriteria
221	4.02	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Dari tabel diatas bahwa responden sebanyak 38 orang atau sebesar 69,09 persen menyatakan setuju dan sebanyak 10 orang atau sebesar 18,18 % menyatakan sangat setuju, hal ini menggambarkan Anggota DPRD Provinsi Riau menganggap penting adanya kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat melalui proses musrenbang dalam menentukan strategi dan prioritas APBD.

- 3) Bagi Dewan partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD

**Tabel 3.7**

**MENURUT ANDA, BAGI ANGGOTA DEWAN PARTISIPASI PUBLIK  
MENJADI DASAR DALAM RANGKA MENYUSUN APBD**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	18	32,73
2	Setuju (S)	27	49,09
3	Ragu-ragu (RR)	7	12,73
4	Tidak Setuju (TS)	2	3,64
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	1,82
	Jumlah	55	100

Skor Total	Rata-rata	Kriteria
224	4.07	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Berdasarkan tabel di atas bahwa responden sebanyak 27 orang atau sebesar 49,09 % menyatakan setuju dan sebanyak 18 atau sebesar 32,73 % menyatakan sangat setuju, hal tersebut menggambarkan Anggota DPRD Provinsi Riau menganggap penting peran partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan



APBD. Musrenbang adalah salah satu sarana untuk memfasilitasi partisipasi tersebut.

- 4) Menurut anggota Dewan, Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran

**Tabel 3.8**  
**MENURUT ANDA, MASYARAKAT SELAMA INI BERPARTISIPASI**  
**AKTIF DALAM ADVOKASI ANGGARAN**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	11	20,00
2	Setuju (S)	32	58,18
3	Ragu-ragu (RR)	7	12,73
4	Tidak Setuju (TS)	5	9,09
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00
	Jumlah	55	100

Skor Total	Rata-rata	Kriteria
214	3,89	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden diatas bahwa sebanyak 32 atau sebesar 58,18 % menyatakan setuju dan sebanyak 11 atau sebesar 20,00 % menyatakan sangat setuju hal ini menggambarkan bahwa Anggota DPRD Provinsi Riau terbuka dalam menanggapi dan menangani advokasi masyarakat perihal anggaran. Anggota DPRD Provinsi pun senantiasa terbuka dalam menghadapi proses unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

- 5) Pendapat anggota dewan bahwa antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD

**Tabel 3.9**  
**MENURUT ANDA, ANTARA DEWAN, MASYARAKAT DAN**  
**EKSEKUTIF MENGKONSULTASIKAN ATAS RANCANGAN APBD**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	17	30,91
2	Setuju (S)	26	47,27
3	Ragu-ragu (RR)	7	12,73
4	Tidak Setuju (TS)	5	9,09
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00
	Jumlah	55	100
<b>Skor Total</b>		<b>Rata-rata</b>	<b>Kriteria</b>
220		4,00	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Dari tabel di atas bahwa jawaban Responden sebanyak 26 orang atau sebesar 47,27 % menyatakan setuju dan sebanyak 17 orang atau sebesar 30,91 % menyatakan sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Riau senantiasa melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan RAPBD.

- 6) Menurut Anggota Saran dan kritik dari masyarakat dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran.

**Tabel 3.10**  
**MENURUT ANDA, SARAN DAN KRITIK DARI MASYARAKAT**  
**DIJADIKAN PERTIMBANGAN UNTUK MEREVISI ANGGARAN**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	20	36,36
2	Setuju (S)	26	47,27
3	Ragu-ragu (RR)	2	3,64
4	Tidak Setuju (TS)	6	10,91
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	1,82
	Jumlah	55	100

Skor Total	Rata-rata	Kriteria
223	4,05	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Dari tabel di atas bahwa responden sebanyak 26 orang atau sebesar 47,27 % menyatakan setuju dan sebanyak 20 orang atau sebesar 36,36% menyatakan sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa anggota DPRD Provinsi Riau menganggap penting saran dan kritik dari masyarakat untuk dijadikan pertimbangan merevisi anggaran.

- 7) Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi

**Tabel 3.11**  
**MENURUT ANDA, JIKA TERJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM HAL APBD BIASANYA DEWAN MENSOSIALISASIKAN DAN MASYARAKAT MENDAPATKAN INFORMASI**

No.	Alternatif Jawaban	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	8	14,55
2	Setuju (S)	37	67,27
3	Ragu-ragu (RR)	6	10,91
4	Tidak Setuju (TS)	4	7,27
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0,00
	Jumlah	55	100

Skor Total	Rata-rata	Kriteria
214	3,89	Setuju

Sumber : Data primer yang diolah, 2009

Berdasarkan dari rekapitulasi diatas bahwa jawaban responden sebanyak 37 orang atau sebesar 67,27 % menyatakan setuju dan sebanyak 8 orang atau sebesar 14,55 % menyatakan sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan APBD di sosialisasikan secara baik oleh anggota DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

Setelah data disajikan pada bab III, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa untuk mengetahui persepsi anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2009 – 2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana yang dijelaskan dalam bab I dalam penelitian ini. Dalam analisa data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan data apa adanya yang kemudian di analisa sesuai data yang didapat. Untuk melihat penjabaran hasil penelitian berikut penjelasan dari persepsi anggota dewan terhadap partisipasi masyarakat.

Dari seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa masyarakat provinsi Riau telah benar-benar dilibatkan didalam proses penyusunan arah kebijakan umum APBD, penyusunan rancangan APBD maupun didalam proses revisi APBD. Melalui wakil-wakil rakyat di DPRD aspirasi masyarakat disampaikan kepada Pemerintah provinsi riau. Didalam masa reses anggota dewan melakukan proses *hearing* dengan masyarakat secara langsung yang disebut dengan Penjaringan Aspirasi Masyarakat hasilnya kemudian dirumuskan dan disebut dengan Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang digunakan sebagai salah satu acuan didalam proses penyusunan rancangan APBD.

Anggota DPRD pun memiliki Kotak Pos Pengaduan Masyarakat yang ditangani oleh bagian Humas Sekretaris Dewan yang menerima pengaduan, keluhan ataupun usulan dalam bentuk surat tertulis secara langsung dari

masyarakat. Masyarakat pun dapat secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD didalam kegiatan kunjungan rutin yang berlangsung tiap satu minggu sekali. Lembaga DPRD Provinsi Riau juga membuka pengaduan, keluhan ataupun usulan melalui Layanan Kotak Pos Pengaduan. Kemudian masyarakat pun dapat melakukan unjuk rasa/demonstrasi sebagai salah satu cara dalam menyampaikan aspirasi

Sesuai hasil observasi dan wawancara penulis dilapangan bahwa anggota DPRD provinsi Riau selalu mengatakan bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk lebih ditingkatkan lagi, sebagaimana yang diungkap oleh Anggota DPRD dari partai PKB M. Dunir.

“Kita jangan terlalu banyak berharap kepada media massa dan pengamat sosial untuk kontrol sosial, karena fungsinya hanya sebagai ”jembatan” informasi, yang menentukan adalah masyarakat/publik itu sendiri sebagai pemilik dana dalam bentuk retribusi, pajak dan bentuk sumbangan/pembayaran lainnya. Pemda adalah yang diberi amanah menjalankan tugas dan sudah digaji dari uang publik itu sendiri. (M. Dunir. Wawancara, Desember 2009”

Dari pernyataan tersebut bahwa masyarakat membutuhkan informasi tentang program pembangunan daerah yang telah disusun melalui proses perencanaan partisipatif pada Musrenbang dari level desa hingga provinsi. Kebutuhan informasi ini lebih dikarenakan pentingnya monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan pembangunan harus diawasi dan evaluasi karena masyarakat adalah yang menanggung beban biaya pembangunan. Juga sebagai penerima manfaat keberhasilan pembangunan dan penerima dampak negatif ketika pembangunan menuai kegagalan. Jadi partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar

sebagai pembayar pajak semata, namun harus dapat berperan sebagai subjek (pelaku) pembangunan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penulis mengamati selama penelitian dilaksanakan terhadap responden, penulis menemukan adanya respon yang lambat terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengusulkan mengenai kebijakan penyusunan APBD, tetapi setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu anggota DPRD provinsi Riau ternyata persepsi nya bahwa:

“Selama ini partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat sangat intens di tingkat pemerintahan desa, dan semakin baik di tingkat lebih tinggi/pemerintahan provinsi, memang partisipasi masyarakat untuk ke depan untuk ditingkat lagi dalam mengontrol kebijakan penyusunan APBD”(Ayat Cahyadi, Wawancara, Desember 2009)

Dari uraian diatas berarti anggota DPRD Provinsi Riau betul-betul menganggap penting adanya peran serta partisipasi masyarakat. Salah satu indikator lainnya adalah penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi, yang mengundang berbagai macam elemen-elemen masyarakat dan lapisan masyarakat serta berbagai macam lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka peneliti dapat menyusun dan merumuskan kesimpulan bahwa persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah Baik. Kesimpulan tersebut di dapatkan dari analisis atas seluruh jawaban yang ada serta interpretasi atas tiap-tiap poin pertanyaan kuesioner. Bahwa masyarakat telah benar-benar dilibatkan didalam proses penyusunan arah kebijakan umum APBD, penyusunan rancangan APBD maupun didalam proses revisi APBD melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi.

#### **B. Saran**

Saran yang disusun oleh penulis merupakan pendapat penulis yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini demi mewujudkan keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Pendapat ini dihasilkan selama melakukan kegiatan penelitian di Lembaga DPRD serta hasil analisis data dan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah disusun dan teori – teori yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Mardiasmo (2003) Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dan legislatif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria berikut :

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Kriteria-kriteria tersebut menurut persepsi Anggota DPRD Provinsi Riau telah dapat dipenuhi dengan baik.

- a. Tingkat partisipasi masyarakat yang telah ada senantiasa dipertahankan dan senantiasa diupayakan untuk terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan peraturan-peraturan daerah serta pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung bagi masyarakat Provinsi Riau
- b. Dapat memberikan masukan bagi masyarakat bahwasanya betapa pentingnya partisipasi masyarakat dan peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan keuangan daerah. Sehingga pada saat penyusunan/penyetujuan suatu anggaran khususnya keuangan daerah nantinya, benar-benar bisa lebih akurat, akuntabel serta transparansi pada publik
- c. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel penelitian dengan berbagai karakteristik *Good Governance* yang lain dan memperbesar sampel yang ada dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang tergabung didalam Panitia Anggaran Legislatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (editor), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (revisi)*, UPP. AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Akuntansi Dan pengendalian Keuangan Daerah*, UPP. AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Brinkerhoff, R.O. *Program evaluation: A practitioner's guide for trainers and educators*. Kluwer-Nijhoff Publishing Boston: 2002
- Eddi Wibowo, Tomo HS, dan Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance*, YPPAI, Yogyakarta, 2004.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, *Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta, 2002
- Jones, Rowan and Maurice Pendlebury, *Public Sector Accounting 5<sup>th</sup> edition*, Pitman Publishing, London, 2000
- Kasali, Renald. *Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 1994.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*, Andi, Yogyakarta, 2003
- Rakhmat, Jalaluddin.. *Psikologi komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005
- Ruslan, Rosady,. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 1999
- Sobur. Alex. *Semiotika Komunikasi*. CV. Pustaka Setia Bandung, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2004
- Walgito, B. *Pengantar Psikologi Umum*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Andi Offset Jogjakarta: 1994

Welsch, Glenn. *A Budgeting: Profit Planning and Control*, Fifth Edition, Prentice Hall International Inc., New Jersey, 1995

Wikipedia. <http://www.wikipedia.com>, 2004

[www.riau.go.id](http://www.riau.go.id), 2006

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Data Rekapitulasi Persepsi Anggota DPRD terhadap Partisipasi Masyarakat

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 JENIS KELAMIN RESPONDEN .....	47
Tabel 3.2 USIA RESPONDEN.....	48
Tabel 3.3 PENDIDIKAN RESPONDEN .....	48
Tabel 3.4 PEMBAGIAN KOMISI RESPONDEN .....	49
Tabel 3.5 MENURUT ANDA, BAGI ANGGOTA DEWAN PARTISIPASI PUBLIK MENJADI DASAR DALAM RANGKA MENYUSUN APBD.....	50
Tabel 3.6 MENURUT ANDA, KRITIK DAN SARAN MASYARAKAT DAPAT MENENTUKAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD .....	50
Tabel 3.7 MENURUT ANDA, BAGI ANGGOTA DEWAN PARTISIPASI PUBLIK MENJADI DASAR DALAM RANGKA MENYUSUN APBD.....	51
Tabel 3.8 MENURUT ANDA, MASYARAKAT SELAMA INI BERPARTISIPASI AKTIF DALAM ADVOKASI ANGGARAN 52	
Tabel 3.9 MENURUT ANDA, ANTARA DEWAN, MASYARAKAT DAN EKSEKUTIF MENGKONSULTASIKAN ATAS RANCANGAN APBD.....	53
Tabel 3.10 MENURUT ANDA, SARAN DAN KRITIK DARI MASYARAKAT DIJADIKAN PERTIMBANGAN UNTUK MEREVISI ANGGARAN .....	53
Tabel 3.11 MENURUT ANDA, JIKA TERJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM HAL APBD BIASANYA DEWAN MENSOSIALISASIKAN DAN MASYARAKAT MENDAPATKAN INFORMASI .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 Alur Perencanaan Program menurut UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran menurut UU Keuangan Negara.....	
20	
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Riau .....	44

## **Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian**

### **KUESIONER PENELITIAN**

#### **PERSEPSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU PERIODE 2009 – 2014 TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

##### **A. Pertanyaan Karakteristik Responden**

Berikan tanda silang (×) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdara/i anggap sesuai:

- 1. Jenis Kelamin** : a. Pria  
b. Wanita
- 2. Usia** : a. 21 - 35 tahun  
b. 36 - 45 tahun  
c. > 46 tahun
- 3. Pendidikan Terakhir** : a. SLTA  
b. Akademin/D3  
c. S1  
d. S2  
e. S3
- 4. Komisi** : a. Komisi A  
b. Komisi B  
c. Komisi C  
d. Komisi D

Berikan tanda silang pada kolom alternatif jawaban yang telah tersedia, untuk jawaban yang paling tepat menurut persepsi Anda:

## **B. Kuesioner Pernyataan Partisipasi Masyarakat**

1. Menurut anda, masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-Ragu
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak setuju
2. Kritik dan saran masyarakat menurut Anda dapat menentukan strategi dan prioritas APBD.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-Ragu
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak setuju
3. Bagi Anda partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-Ragu
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak setuju
4. Menurut Anda, Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-Ragu
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak setuju
5. Menurut Anda, antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD
  - a. Sangat Setuju
  - b. Setuju
  - c. Ragu-Ragu
  - d. Tidak Setuju
  - e. Sangat Tidak setuju

6. Menurut anda, Saran dan kritik dari masyarakat, dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-Ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak setuju

7. Menurut Anda, Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-Ragu
- d. Tidak Setuju
- e. Sangat Tidak setuju



**Lampiran 2. Data Rekapitulasi Persepsi Anggota DPRD terhadap Partisipasi Masyarakat**

No.	Pertanyaan Partisipasi Masyarakat						
1	5	4	4	4	4	4	5
2	5	4	4	4	5	5	5
3	5	4	4	3	4	4	4
4	4	4	5	4	4	1	4
5	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	1	2	2	4	4
7	4	4	4	4	5	4	4
8	5	5	5	4	5	5	3
9	4	4	4	4	5	5	4
10	4	4	5	2	3	4	4
11	5	4	3	3	4	4	3
12	5	3	4	3	4	4	4
13	5	4	4	4	3	5	4
14	4	4	4	5	2	3	3
15	5	4	4	5	5	4	4
16	5	4	4	4	4	2	4
17	5	2	4	4	2	5	4
18	5	4	2	4	4	5	4
19	3	5	4	4	4	5	4
20	5	4	3	4	4	2	2
21	5	5	5	5	3	4	4
22	5	4	2	3	3	4	3
23	3	5	5	2	5	2	2
24	5	4	4	4	4	4	4
25	5	2	5	5	4	5	5
26	5	4	5	5	3	4	5
27	2	4	4	4	4	5	5
28	5	4	3	4	4	4	4
29	5	4	5	4	3	4	5
30	5	4	5	5	5	4	3
31	5	3	5	4	4	2	4
32	5	4	5	3	4	4	4
33	3	4	4	4	4	5	3
34	5	4	5	4	4	4	4
35	4	5	5	2	4	4	4
36	5	3	4	4	5	5	4
37	4	4	4	3	4	4	2
38	4	4	3	4	2	3	4
39	4	5	4	5	5	4	5
40	5	3	5	4	3	5	4
41	5	4	4	4	4	5	4
42	4	5	3	2	5	5	4
43	5	4	4	4	5	5	4

44	3	4	4	4	4	5	5
45	5	4	5	4	5	5	4
46	5	5	5	5	4	2	4
47	4	4	3	4	5	4	4
48	5	4	4	3	4	2	2
49	5	4	3	4	2	4	4
50	5	3	4	4	5	5	4
51	4	4	5	5	4	4	4
52	4	4	5	4	4	5	4
53	4	5	4	5	5	4	4
54	5	5	4	4	5	5	4
55	5	4	4	5	5	4	4